



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**


**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


# RENJA POKOK 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH**



 Bappeda Bone New

 bappeda bone

 bappeda\_bone



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 37 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BONE TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107);

20. Peraturan Bupati Bone Nomor .... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor ....).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

## **BAB III SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Pasal 4**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD

Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 6**

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

#### **Pasal 7**

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB IV  
PENUTUP**


**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 25 Juli 2022

**BUPATI BONE,**



**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 25 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**



**ANDI ISLAMUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 39**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun dapat diselesaikan. Dalam pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004

tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah mewajibkan setiap perangkat daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana kerja Pemerintah (RKPD) sebagai rencana Kerja tahunan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) 2023 ini, Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan, sehingga dapat mendukung capaian Visi dan Misi Kabupaten BONE MABESSA. Terima kasih

Watampone, 25 Juli 2022



**KEPALA BAPPEDA KAB. BONE,**

**Dr.HADE FARIQ ASHAR, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19850126 200312 1 002

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7

### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstr .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Telaan terhadap kebijakan Nasional .....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah.....	33
3.3 Program dan Kegiatan .....	34

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT**

#### **DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan.

Sebagai tindak lanjutnya, kepala Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sertamengacu pada hasil-hasil Musrenbang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Didalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat direalisasikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu .Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2018 – 2023, skala prioritas, Visi, Misi dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi dari Bappeda.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda disusun secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan SKPD. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Di dalam Renja Perangkat daerah juga memuat permasalahan- permasalahan yang belum dapat direalisasikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daaerah lainnya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaen Bone Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019;
16. Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 tahun 2021 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone);
23. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda tahun 2019 – 2023.
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang.
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**BAB I** Pendahuluan , bab ini memuat latar belakang perlunya Rencana Kerja, maksud dan tujuan , landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penulisan.

**BAB II** Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat

Daerah tahun lalu, bab ini memuat beberapa program, kegiatan dan pendanaan yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan.

**BAB III** Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, bab ini dipaparkan rumusan strategi dari kebijakan yang dirancang secara konseptual, analisis, realistik, rasional dan komprehensif dalam upaya mewujudkan tujuan.

**BAB IV** Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, bab ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing program dan pagu anggaran tahun 2023 serta prakiraan maju tahun 2024.

**BAB V** Penutup, menyajikan kesimpulan dan harapan atas rencana kerja Bappeda kab. Bone pada Tahun 2023.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi SIPD;
3. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan Narasumber yang kompeten.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone sampai dengan



## Tahun 2021

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Bappeda Kabupaten Bone telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2021, Bappeda Kabupaten Bone secara keseluruhan menganggarkan sebesar Rp. 6.889.933.440,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.743.660.404,- atau sebesar 97,88 % dari total alokasi yang ada.

Berikut adalah dana yang dianggarkan beserta realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Pada tabel 2.1, umumnya kinerja tahun 2021 berjalan dengan baik dengan rata-rata pencapaian kinerja 97,88 %.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program( Renstra Perangkat Daerah) Tahun2018s/d 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(Tahun2021)			Target programda n kegiatan (Renja PerangkatD aerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun2021	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaianPr ogramdanKegiatan /d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra( %)
1	2	3	4	5	6	7	8-(6/7)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah  Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik								
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Penyusunan Dokumen tPerencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat yang tersusun (dokumen)	7 Dokumen		3 Dokument	3 Dokument	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	75 %

**Tabel 2.1**  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan  
Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah s/d Tahun 2021

				Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan capaian kinerja daerah yang tersusun (dokumen)	6 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	80%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (laporan)	42 laporan		14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	28 Laporan	65 %
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah	6 Dokumen		2 Dokument	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	4 Dokumen	80 %
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik hasil ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan (paket)	6 Paket		2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket	4 Paket	80%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat PIM (orang)	6 Orang		2 Orang	2 Oarang	100 %	2 Orang	4 Orang	80 %

				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan (paket)	3 Paket		1 Paket	1 Pakte	100%	1 Paket	2 Paket	65 %
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	umlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	36 Paket		12 Paket	12 Paket	100 %	12 paket	24 paket	65 %
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	36 paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	65%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Pembayaran Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	36 paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	65%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (laporan)	300 laporan		100 Laporan	100 Laporan	100%	100 Laporan	200 Laporan	66 %
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKP	Jumlah Paket Pemeliharaan Website penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	3 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	65%

165			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			PengadaanMebel	Jumlah Pengandaan Mebel Kantor sesuai rencana (unit))	25 Unit		10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	20 Unit	80%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin sesuai rencana kebutuhan (unit)	25 Unit		10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	20 Unit	80%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah realisasi pembayaran jasa komunikasi perbulan (internet) sesuai rencana kebutuhan perbulan (rekening)	36 Rekening		12 Rekening	12 Rekening	100%	12 Rekening	24 Rekening	66%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan realisasi jasa/upah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (laporan)	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	66%
			Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (paket)	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	3 Paket	60%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan (unit)	25 Unit		10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	20 Unit	75%
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang dipelihara secara (unit)	25 Unit		10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	20 Unit	75%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas dan yang terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun	97 Pemeliharaan		21 Pemeliharaan	21 Pemeliharaan	100%	35 Pemeliharaan	56 Pemeliharaan	57%
			PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD								
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase laporan perencanaan dan pendanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan forum konsultasi publik yang terlaksana	3 Kali		1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	2 Kali	66%



			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang RKPD yang dilaksanakan (laporan)	3 Kali		1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	2 Kali	66%
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah laporan Bahan Musrenbang yang tersedia untuk Kecamatan (laporan)	3 Kali		1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	2 Kali	66%
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang ditetapkan	7 Rekomendasi		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100%	2 Rekomendasi	4 Rekomendasi	55%
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Aplikasi E-Planning yang dimanfaatkan (Aplikasi)	9 Aplikasi		3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	3 Aplikasi	6 Aplikasi	66%
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang tersusun (laporan)	12 laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	66%

		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan	Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Pemerintahan yang tersusun (rekomendasi)	69 Rekomendasi		23 Rekomendasi	23 Rekomendasi	100%	23 Rekomendasi	46 Rekomendasi	66%
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia yang tersusun (rekomendasi)	12 Rekomendasi		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100%	4 Rekomendasi	8 Rekomendasi	66%
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun (laporan)	3 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	66%
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Persentase Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang tersusun (laporan)	3 laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	66%
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	Jumlah Laporan hasil evaluasi dan monitoring perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian yang tersusun (laporan)	7 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	4 Laporan	60%

			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah d\okumen hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang SDA yang tersusun (dokumen)	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	66 %
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur(RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang tersusun (dokumen)	7 Dokument		5 Dokumen	5 Dokument	100%	1 Dokument	6 Dokument	85%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang tersusun (dokumen)	7 Dokumen		1 Dokument	1 Dokumenr	100%	3 Dokument	4 Dokumen	60%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang tersusun (dokumen)	15 Dokumen		5 Dokument	5 Dokument	100%	5 Dokument	10 Dokument	66%

Realisasi anggaran belanja langsung mencapai Rp. 6.743.660.404,- atau 97,88, %. Namun demikian masih terdapat perbedaan dengan kondisi stakeholder. Hal ini terlihat dari indikator kinerja yang digunakan sebagian besar masih pada tingkat output dan hanya sebahagian kecil yang dapat mencapai outcome dan merupakan outcome level terendah sebagaimana idealnya harapan stakeholder indikator kinerja sasaran mencapai outcome. Hal ini disebabkan organisasi belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome, atas seluruh kegiatan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi riil yang diharapkan. Secara keseluruhan tidak ditemukan hambatan atau kendala yang berarti, sehingga pencapaian target dapat terlaksana dengan baik.

## ***2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah***

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena berhadapan langsung dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang ada di wilayah terkait. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Namun begitu tidak berarti bahwa hal itu akan menjadi suatu hambatan yang tidak dilampaui, melainkan justru menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah jika perencana mampu mengatasinya.

Bappeda Kabupaten Bone melaksanakan fungsi penunjang daerah di bidang Perencanaan serta tugas pembantuan lainnya. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bone ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone serta Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bone Tahun 2013- 2018. Perubahan Renstra yang mencakup perubahan penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran, mengakibatkan sebagian indikator kinerja belum terukur pada Tahun 2021

Pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone telah dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun yang sesuai Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bone, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan terknis perencanaan pembangunan daerah
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
3. Melaksanakan tugas pembinaan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematis, produknya dirumuskan dengan sistematis dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Tabel Analisis Pencapaian Layanan Kinerja akan disajikan dalam tabel berikut :

### Analisis Pencapaian Kinerja Bappeda Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	TargetRenstraPerangkatDaerah				RealisasiCapaian		Tahun 2020	Tahun 2021	Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2022	Tahun 2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)			(13)
1	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP			C	B	CC	B	C	B	BB	A	A	AA			
2	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (persen)			75	6	77	77	75	76	80	85	90	95			
3	Persentase Hasil Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan atau ditindak lanjuti(persen)			80	85	85	90	80	85	87	88	90	93			
4	Persentase Kesesuaian Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja dalam RKPD dengan RPJMD(persen)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
5	Persentase Kesesuaian Tujuan Program APBD dengan RKPD(per sen)			85	85	90	95	85	85	88	90	90	95			



### **2.3 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya adalah terkait:

1. Relatif rendahnya kualitas SDM, pengumpul, pengolah dan penyaji laporan/data dari kemampuan teknis perencanaan dan kualitas pendidikan formal
2. Kurangnya peralatan komunikasi berbasis Informasi Teknologi (IT)
3. Masih kurang sinerginya kordinasi antar Bidang pada Bappeda dan masih kurang sinergisnya koordinasi eksternal dengan Perangkat Daerah.
4. Masih rendahnya kualitas produk perencanaan terlihat dari rumusan tinngkatkinerja yang belum SMART-C
5. Belum adanya data yang akurat, valid, dan relevansi data yang up to date yang dapat mendukung kualitas produk perencanaan yang baik.

### **2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan terhadap Program/Kegiatan OPD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya merubah

beberapa nomenklatur program dan kegiatan. Perubahan tersebut didasari:

1. Diterbitkannya peraturan Bupati Bone Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.
2. Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018
3. Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018 Perbandingan Program/Kegiatan OPD yang disusun berdasarkan dokumen

Rancangan Awal RKPD dan Hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel

TABEL 2.4

## Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		umlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (laporan)	12	3.604.364.542	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (laporan)	12	3.604.364.542	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	TR. Barat	umlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah	3 Paket	22.607.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	TR. Barat	umlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah	3 Paket	22.607.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>TR. Barat</b>	Persentase laporan periodik hasil ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	<b>100</b>	<b>129.443.200</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>TR. Barat</b>	Persentase laporan periodik hasil ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	<b>100</b>	<b>129.443.200</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	TR. Barat	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat PIM (orang)	1 Orang	23.045.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	TR. Barat	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat PIM (orang)	1 Orang	23.045.000	

	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundangundangan	TR. Barat	Jumlah laporan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana (laporan)	35 Orang	106.398.200	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundangundangan	TR. Barat	Jumlah laporan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana (laporan)	35 Orang	106.398.200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		902.766.920						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TR. Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	53,196,350	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TR. Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	53,196,350	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	TR. Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22,453,030	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	TR. Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22,453,030	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TR. Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	58,307,540	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TR. Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	58,307,540	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10,750,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10,750,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24,520,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24,520,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	718,540,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	718,540,000	

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		638.877.670						
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona	Tr. Barat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan (unit)	1 Unit	513.850.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona	Tr. Barat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan (unit)	1 Unit	513.850.000	
	Pengadaan Mebel	Tr. Barat	Jumlah Pengandaan Mebel Kantor sesuai rencana (unit)	1 Unit	4.092.746	Pengadaan Mebel	Tr. Barat	Jumlah Pengandaan Mebel Kantor sesuai rencana (unit)	1 Unit	4.092.746	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tr. Barat	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin sesuai rencana kebutuhan (unit)	10 Unit	118.977.924	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tr. Barat	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin sesuai rencana kebutuhan (unit)	10 Unit	118.977.924	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah		145.068.000						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tr. Barat	Jumlah realisasi pembayaran jasa komunikasi perbulan (internet) sesuai rencana kebutuhan perbulan (rekening)	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tr. Barat	Jumlah realisasi pembayaran jasa komunikasi perbulan (internet) sesuai rencana kebutuhan perbulan (rekening)	12 Laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tr. Barat	umlah laporan realisasi jasa/upah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (laporan)	12 Laporan	133.068.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tr. Barat	umlah laporan realisasi jasa/upah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (laporan)	12 Laporan	133.068.000	

	<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah</b>		<b>165.279.703</b>						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga		Jumlah jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas dan yang terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun (pemeliharaan)	35 Unit	107.587.203	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga		Jumlah jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas dan yang terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun (pemeliharaan)	35 Unit	107.587.203	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebeleur kantor yang yang dipelihara secara (unit)	1 unit	7.192.500	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebeleur kantor yang yang dipelihara secara (unit)	1 unit	7.192.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesinn kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan (unit)	10 Unit	19.150.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesinn kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan (unit)	10 Unit	19.150.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny		Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (paket)	1 Unit	31.350.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny		Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (paket)	1 Unit	31.350.000	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD</b>								
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		<b>Persentase laporan dan perencanaan pendanaan</b>		<b>494.127.000</b>						
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah laporan forum konsultasi publik yang terlaksana		27.040.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah laporan forum konsultasi publik yang terlaksana		27.040.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ kota		Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang ditetapkan		5.493.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ kota		Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang ditetapkan		5.493.000	

	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tr.Barat	Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang RKPD yang dilaksanakan (laporan)	1 Berita Acara	54.694.100	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tr.Barat	Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang RKPD yang dilaksanakan (laporan)	1 Berita Acara	54.694.100	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tr.Barat	umlah laporan Bahan Musrenbang yang tersedia untuk Kecamatan (laporan)	1860 Usulan	23.950.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tr.Barat	umlah laporan Bahan Musrenbang yang tersedia untuk Kecamatan (laporan)	1860 Usulan	23.950.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ kota	Tr.Barat	umlah dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang ditetapkan	3 Dokumen	382.949.900	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ kota	Tr.Barat	umlah dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang ditetapkan	3 Dokumen	382.949.900	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan		150.000.000						
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Tr.Barat	umlah Aplikasi E-Planning yang dimanfaatkan (Aplikasi)		150.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Tr.Barat	umlah Aplikasi E-Planning yang dimanfaatkan (Aplikasi)		150.000.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		ersentase Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan yang tersusun								
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Tr.Barat	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang tersusun (laporan)	4 Laporan	219.688.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Tr.Barat	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang tersusun (laporan)	4 Laporan	219.688.000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan Daerah lingkup bidang ekonomi,  Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan Daerah lingkup bidang PPM  Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan Daerah								

			lingkup bidang Infrastwil								
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	452.108.990							
	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Pemerintahan yang tersusun (rekomendasi)	2 Dokumen	190.289.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Pemerintahan yang tersusun (rekomendasi)	2 Dokumen	190.289.500	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun (rekomendasi)	1 Dokumen	155.271.490	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun (rekomendasi)	1 Dokumen	155.271.490	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia yang tersusun (rekomendasi)	1 Laporan	106.548.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia yang tersusun (rekomendasi)	1 Laporan	106.548.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun		390.000.675						
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tr.Barat	Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang tersusun (laporan)	11 Dokumen	120.000.185	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tr.Barat	Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang tersusun (laporan)	11 Dokumen	120.000.185	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	Tr.Barat	dan monitoring perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian yang tersusun (laporan)	1 Laporan	150.000.145	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Tr.Barat	dan monitoring perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian yang tersusun (laporan)	1 Laporan	150.000.145	



						Bidang perekonomian					
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tr.Barat	Jumlah d\okumen hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang SDA yang tersusun (dokumen)	1 Dokumen	120.000.075	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tr.Barat	Jumlah d\okumen hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang SDA yang tersusun (dokumen)	1 Dokumen	120.000.075	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tersusun	500.000.000							
	Persentase dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tersusun	Tr.Barat	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang tersusun (dokumen)	11 Dokumen	120.000.185	Persentase dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tersusun	Tr.Barat	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang tersusun (dokumen)	11 Dokumen	120.000.185	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Tr.Barat	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang tersusun (dokumen)	1 Laporan	150.000.415	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Tr.Barat	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang tersusun (dokumen)	1 Laporan	150.000.415	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tr.Barat	Jumlah Dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang tersusun (dokumen)	1 Dokumen	120.000.075	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tr.Barat	Jumlah Dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang tersusun (dokumen)	1 Dokumen	120.000.075	

## ***2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat***

Kajian dan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Namun, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.

### **BAB III.**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2019, Tema Pembangunan Nasional adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023 sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023 yang ditetapkan sebagai konsep awal (rancangan teknokratis) dalam masa transisi Pemerintahan Kabupaten Bone dari Periode Lima sebelumnya (Tahun 2013–2018) menuju periode Lima Tahun selanjutnya (Tahun 2018-2023) adalah sebagai berikut :

**“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”** Visi tersebut di atas kemudian diangkat menjadi tema pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan tema RKP Nasional dan RKPD Pemerintah Provinsi yaitu :

“Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Yang Mandiri dan Berdaya Saing “

Sesuai misi tersebut di atas dan sejalan dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 – 2023 rumusan tujuan dan sasaran renja Bappeda 2023.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka Penyusunan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Periode tahun 2023, maka perlu diadakan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang direncanakan sebesar : Rp. **8.747.323.430** Berdasarkan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun 2023, maka perlu direncanakan sumber dana program dan kegiatan yang dasarnya terdiri dari Program dan Kegiatan Utama, yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki indikator dan target kinerja utama dalam pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai setiap tahunnya untuk mewujudkan tujuan jangka menengah, program dan kegiatan pendukung merupakan program dan kegiatan rutin (organik) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan utama organisasi yang direncanakan dan sasaran yang ingin dicapai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Secara lengkap, rumusan rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2023, dengan mempertimbangkan sumber-sumber penganggaran lainnya yang bersumber dari DAU-APBD Kabupaten. Rincian Program dan Kegiatan kegiatan dimaksud disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>S</b>					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								11,633,491,821
<b>S</b>	<b>01</b>				<b>PERENCANAAN</b>					<b>8,10,915,900</b>			<b>8,334,429,699</b>
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>5,311,094,570</b>			198,929,687
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					272,173,290			
S	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	2 Dokumen	151400750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	106,963,637
S	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	2 Dokumen	15,643,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	0
S	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	2 Dokumen	12,678,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	0
S	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	2 Dokumen	92,451,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata- Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	91,966,050
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>3,401,140,455</b>			<b>6,055,893,755</b>
S	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	12 Gaji	3,336,060,455	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	6,053,893,755

S	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	2 D	65,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	2,526,420
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Perangkat Daerah</b>			<b>110,658,750</b>				<b>143,137,500</b>
S	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	2 Paket	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	
S	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	5 Orang	42,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	60,500,000
S	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	5 Kegiatan	40,803,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum</b>	<b>Perangkat Daerah</b>			<b>624,610,900</b>				<b>764,054,997</b>
S	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	4 Paket	63,041,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	57,763,211
S	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	1 Paket	10,815,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	6,050,000
S	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	3 Paket	40,042,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	52,607,170
S	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Ceatakan dan Penggandaan	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	12 Paket	18,282,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	27,899,696
S	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	4 Paket	29,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	35,000,000
S	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	100 Kegiatan	449,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	536,334,920

S	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	1 Paket	13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	48,400,000
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>564,104,185</b>	<b>454,357,500</b>			
S	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau LAPANGAN	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	2 \Pengadaa n	360,942,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	399,000,000
S	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	5 Pengadaan	53,731,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	39,930,000
S	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5 Peralatan	149,430,485	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	15,427,500
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>188,952,000</b>	<b>255,800,600</b>			
S	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	12 Jasa	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	15,927,000
S	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	280 Jasa	176,952,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	239,828,600
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>149,454,990</b>	<b>462,255,660</b>			
S	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	21 Kendaraan	58,177,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	76,230,000
S	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	5 Peralatan	15,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	40,800,000
S	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Rata-Rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	TR. Barat	1 Paket	76,177,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	345,225,660



KODE					Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
S	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				876,228,260			1,215,348,443	
S	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				547,947,700			877,200,388	
S	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yangDitetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	TR. Barat	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	75,000,000
S	01	02	2.01	03	Pelaksanaan KonsultasiPublik	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yangDitetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	TR. Barat	1 Forum	27,500,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	30,250,000
S	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yangDitetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	TR. Barat	39 OPD	25,000,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	27,500,000
S	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Mustrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yangDitetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	TR. Barat	1 Kegiatan	61,055,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	214,830,000
S	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbag Kecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yangDitetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	TR. Barat	1 Dokumen	36,729,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	42,350,000
S	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan	Persentase Ketersediaan	TR. Barat	2 Dokumen	397,661,790	Dana		Presentase	

					dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi				Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				148,599,500				140,500,000
S	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	TR. Barat	4 Aplikasi	132,013,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	60,500,000
S	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	TR. Barat	2 Paket	16,586,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	80,000,000
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				179,681,060				197,648,055
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>	<b>03</b>	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	TR. Barat	4 Laporan	179,681,060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	197,648,055
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>1,823,593,070</b>				<b>2,083,713,679</b>
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>				<b>600,000,000</b>				<b>813,906,742</b>
S	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur kewilayahan	Semua Kabupaten	4 Dokumen	192,885,100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Presentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur Kewilayahan	352,312,191
S	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Semua Kabupaten	4 Dokumen	211,101,950	Pendapatan Asli Daerah		Presentase Kelerasan dokumen perencanaan	280,094,551

					Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur kewilayahan	n			(PAD)		perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur Kewilayahan	
S	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur kewilayahan	Semua Kabupaten	1 Dokumen	196,012,950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Presentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur Kewilayahan	181,500,000
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia)</b>				519,988,820				664,806,937
S	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur kewilayahan	Semua Kabupaten	2 Dokumen	165,001,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur Kewilayahan	148,661,205
S	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	Persentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur kewilayahan	Semua Kabupaten	2 Laporan	30,337,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur Kewilayahan	0
S	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur kewilayahan	Semua Kabupaten	1 Dokumen	274,606,370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur Kewilayahan	266,145,732
S	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Persentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur kewilayahan	Semua Kabupaten	100 Persen	50,003,370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur Kewilayahan	250,000,000
<b>S</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>				<b>703,604,250</b>				<b>605,000,000</b>
S	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur kewilayahan	Semua Kabupaten	5 Dokumen	200,689,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Presentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM	108,900,000

					(RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Umum		dan Infrastruktur Kewilayahan	
S	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur kewilayahan	Semua Kabupaten	5 Dokumen	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur Kewilayahan	302,500,000
S	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur kewilayahan	Semua Kabupaten	1 Dokumen	327,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kelerasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur Kewilayahan	193,600,00
TOTAL									8,010,915,000				11,633,491,821

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pembangunan berorientasi pada masyarakat artinya adalah bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai tersebut bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya.

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2023, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bappeda, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01				PERENCANAAN								7,872,674,200			8,747,323,430		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,666,749,535			6,159,093,323		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								62,342,500			65,459,625		
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Dokumen	100 %	22,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	23,604,000
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	4 Dokumen	100 %	4,887,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	5,131,875
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	4 Dokumen	100 %	10,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	10,867,500
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Laporan	100 %	24,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	25,856,250
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,624,971,542			3,806,220,119		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	35 Orang/bulan	100 %	3,602,364,542	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	3,782,482,769
5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Dokumen	100 %	22,607,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	23,737,350
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								129,443,200			135,915,360		
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	% ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Orang	100 %	23,045,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	24,197,250

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	% ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	35 Orang	100 %	106,398,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	111,718,110
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								902,766,920			947,905,266		
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	100 %	53,196,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	55,856,168
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Paket	100 %	22,453,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	23,575,682
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	100 %	58,307,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	61,222,917
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	100 %	10,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	11,287,500
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 %	24,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	25,746,000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	100 Laporan	100 %	718,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	754,467,000
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	15,750,000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								636,877,670			668,721,553		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Unit	100 %	513,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	539,542,500
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Unit	100 %	4,049,746	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,252,233
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	10 Unit	100 %	118,977,924	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	124,926,820
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								145,068,000	152,321,400				
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	12,600,000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	100 %	133,068,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	139,721,400
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								165,279,703	382,550,000				
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	35 Unit	100 %	107,587,203	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	81,500,000
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Unit	100 %	7,192,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	6,050,000
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	10 Unit	100 %	19,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	45,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Unit	100 %	31,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	250,000,000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								863,815,000			1,105,199,795		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								494,127,000			717,027,395		
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Persentase laporan perencanaan dan pendanaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Berita Acara	100 %	27,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	100 Persen	30,250,000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase laporan perencanaan dan pendanaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	5 Berita Acara	100 %	5,493,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	100 Persen	27,500,000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase laporan perencanaan dan pendanaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Berita Acara	100 %	54,694,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	100 Persen	214,830,000
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Persentase laporan perencanaan dan pendanaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1860 Usulan	100 %	23,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	100 Persen	42,350,000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Persentase laporan perencanaan dan pendanaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	3 Dokumen	100 %	382,949,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	100 Persen	402,097,395
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								150,000,000			157,500,000		
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Persentase analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	66 Orang	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	100 Persen	157,500,000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								219,688,000			230,672,400		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan yang tersusun	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	4 Laporan	100 %	219,688,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	100 Persen	230,672,400
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								1,342,109,665	1,483,030,312				
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								452,108,990	474,714,440				
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang PPM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	190,289,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang PPM	100 Persen	199,803,975
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang PPM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	155,271,490	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang PPM	100 Persen	163,035,065
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang PPM	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Laporan	100 persen	106,548,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang PPM	100 Persen	111,875,400
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								390,000,675	483,315,872				
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan perangkat bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA yang tersusun	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	11 Dokumen	100 %	120,000,185	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan dokumen perencanaan perangkat bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	157,500,436
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan perangkat bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA yang tersusun	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Laporan	100 %	150,000,415	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH CHT		Persentase Keselarasan dokumen perencanaan perangkat bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	157,500,436
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan perangkat bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA yang tersusun	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Dokumen	100 %	120,000,075	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan dokumen perencanaan perangkat bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	168,315,000
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								500,000,000	525,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan perangkat bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Presentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	160,300,000	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		Persentase Keselarasan dokumen perencanaan perangkat bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	168,315,000
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan perangkat bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang kewilayahan yang tersusun	Presentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	3 dokument	100 Persen	154,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan dokumen perencanaan perangkat bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	162,435,000
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan perangkat bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Presentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	5 Dokumen	100 Persen	185,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan dokumen perencanaan perangkat bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	194,250,000
TOTAL													7,872,674,200				8,747,323,430	